



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2004

**STUDI EVALUASI TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
DI KABUPATEN LAMONGAN**

Peneliti:

Drs. Roestoto Hartojoputro, SU.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2004

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4223/J03/PP/2004

Tanggal 7 Juni 2004

Nomor Urut: 24

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2004

- COASTS

- ECONOMIC - SOCIOLOGICAL ASPECTS



LP.136/05
Har
s ✓

LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2004

STUDI EVALUASI TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN LAMONGAN

Peneliti:

Drs. Roestoto Hartojoputro, SU.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2004

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4223/J03/PP/2004

013605141

Tanggal 7 Juni 2004

Nomor Urut: 24

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2004



LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studl Wanita (5995722)
7. Puslit Olah Raga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian	: Studi Evaluasi Tingkat Keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kabupaten Lamongan
a. Macam Penelitian	: () Fundamental, () Terapan, () Pengembangan, () Institusional
b. Katagori Penelitian	: () I () II () III () IV
2. Kepala Proyek Penelitian	
a. Nama Lengkap dan Gelar	: Drs. Roestoto Hartojoputro, S.U.
b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Pembina (Gol. IV/a) 130 783 545
d. Jabatan Sekarang	: Lektor Kepala
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Fakultas ISIP
f. Univ./Inst. /Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu Yang Diteliti	: Ilmu Administrasi Publik
3. Jumlah Tim Peneliti	: 1 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian	: Kabupaten Lamongan
5. Kerjasama dengan Instansi Lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka Waktu Penelitian	: 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan	: 4.300.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian	
a. Dilaksanakan Tanggal	: 21 Oktober 2004
b. Hasil Penelitian	: () Baik Sekali (V) Baik () S e d a n g () K u r a n g

Surabaya, 21 Oktober 2004



Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.
NIP. 130 701 125

RINGKASAN PENELITIAN DAN SUMMARY

STUDI EVALUASI TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) DI KABUPATEN LAMONGAN **)

Roestoto Hartojoputro *)

(Tahun 2004 - 34 halaman)

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Kabupaten Lamongan pada tahun 2002 mendapat program PEMP dilaksanakan di 3 desa yaitu Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Desa Tunggal dan Desa Banjarwati di Kecamatan Paciran.

Permasalahan dalam penelitian adalah: Bagaimanakah tingkat keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2002..

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena empiris masyarakat secara luas yang didapatkan dari pernyataan dan keterangan anggota masyarakat.

Informan diambil dari pengelola program PEMP (Mitra Desa dan LEPP-M3), penerima bantuan program (Kelompok Masyarakat Pemanfaat/ KMP), perangkat administrasi lokal baik di Kecamatan dan Kabupaten, serta Konsultan Manajemen Kabupaten.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (depth interview) langsung pada para informan. Data sekunder dikumpulkan dengan cara memanfaatkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (yakni PEMP tahun 2002), yang diambil dari pihak-pihak yang terkait.

Secara umum program PEMP 2002 Kabupaten Lamongan dapat dikatakan kurang berhasil ditinjau dari tersosialisasinya program, terbentuknya lembaga-lembaga, tersalurkannya dana ekonomi produktif, berjalannya pembinaan dan peningkatan jumlah dana dan kelompok sasaran.

Pengembangan lembaga yang sudah dibentuk belum berjalan optimal karena selama dua tahun belum mengarah pada perubahan menjadi lembaga yang berbadan hukum.

Peningkatan jumlah dana kurang berhasil karena selama dua tahun berjalan hanya terjadi peningkatan sebesar 4,36 %. Sedangkan untuk penambahan jumlah anggota KMP dapat disebut berhasil karena terjadi peningkatan sebesar 81,53 %.

*) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga.

***) Dana DIK Suplemen tahun 2004
SK Rektor No. 713/JO3.2/PG/2004 Tanggal 10 Juni 2004..

SUMMARY

THE EVALUATION STUDY OF THE SUCCESSFULLY DEGREE OF THE ECONOMIC COASTAL SOCIETY IMPOSITION PROGRAM (PEMP) IN LAMONGAN REGENCY. **)

Roestoto Hartojoputro *)

(2004 – 34 pp)

The aims of The Economic Coastal Society Imposition Program (*PEMP*) is to increase the coastal society prosperity through of the economic activity development, quality of human resources and the social economic insitution strongly through to deceive of the fisheries and marine resources optimally and continuesly.

Lamongan is one of the Regency gets the *PEMP* Program in 2002, was have been done in 3 villages are Sedayulawas at Brondong District, Tunggul and Banjarwati at Paciran District.

The problem of this research is how the succesfully degree of the Economic Coastal Society Imposition Program (*PEMP*) 2002 in Lamongan Regency.

The research that was has been done is a description research, to describe of the society empyrical fenomena largely that was get from the society members statement and information.

The informan are the *PEMP* program performer (*Mitra Desa* and *LEPP-M3*), the user society group (*KMP*), the local administration element that was in District and Regency, also the Regency Management Consultant.

The primary data collected by depth interview with the informans. The secondary data collected by to used of the documents that relation with the research problem that is gets from the relation sides.

Generally, the *PEMP* Program in Lamongan is relatively not successfull, is showed from the program socialization, institutions formed, the economic productive fund was arrived, the erection continuesly, and fund total and society group increased.

The development of the institutions was formed, is not optimally during two years and not in the direction to the legaly of law institution. The increasing of the fund total is not succesfully, because is only 4,36 % during two years. But that is succesfully on the increasing of the *KMP*, this are 81,53 %.

*) Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Airlangga University.

**) DIK Supplement 2004 : 713/JO3.2/PG/2004, June, 10, 2004..

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT , atas selesainya laporan penelitian tentang Studi Evaluasi Tingkat Keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2002 di Kabupaten Lamongan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengentas kemiskinan terutama bagi masyarakat nelayan ang selalu meningkat. Segala macam usaha sudah banyak dilakukan, akan tetapi belum berhasil secara sempurna, sehingga masih diperlukan jalan keluarnya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan demi kesempurnaannya, penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, November 2004

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN PENELITIAN DAN SUMMARY.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI ..	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
IV. METODE PENELITIAN	11
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	14
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Produksi Ikan Propinsi Jawa Timur per Kabupaten/Kota Tahun 2000	35

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bagian integral dari pembangunan kelautan dan perikanan, saat ini mendapat perhatian dengan skala prioritas yang tinggi, dan menjadi bagian orientasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini terjadi karena wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dengan potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya. Banyaknya kendala dan adanya berbagai keterbatasan kemampuan dan kondisi laut yang sangat kompleks maka pemanfaatan sumber daya laut dan pantai masih belum optimal dan merata (Wahyono, 2001)

Akan tetapi apabila dilihat dari produksi perikanan dari tahun ke tahun, maka terdapat peningkatan produksi, walaupun beberapa jenis ikan tertentu seperti udang windu lebih sering terjadi penurunan (Biro Pusat Statistik, 2003). Produksi perikanan di Pulau Jawa masih menempati nilai tertinggi dengan nilai rata-rata produksi 5.3 milyar rupiah. Nilai ini masih belum memenuhi kebutuhan ikan yang sampai saat ini baru mencapai 60 %. Produksi perikanan di Jawa Timur secara keseluruhan disajikan pada Lampiran I.

Secara normatif, dengan melihat produksi perikanan dan potensi sumber daya alam yang besar tersebut, maka seharusnya masyarakat pesisir yang sebagian besar merupakan pelaku utama, merupakan masyarakat yang sejahtera. Namun pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya. Dampak dari keadaan ini telah mendorong eksploitasi di kawasan pesisir menjadi kurang terkendali sehingga mengakibatkan rusaknya sumberdaya pesisir di beberapa daerah. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh Pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan) melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir, yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang sudah dilaksanakan secara nasional mulai tahun 2000.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan (ekonomi) akan dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan permodalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumberdaya laut dan pesisir yang ada, teknologi yang tersedia serta kualitas sumberdaya manusia yang akan mengelolanya. Kualitas sumberdaya manusia dicirikan oleh perilaku, IMTAQ serta wawasan IPTEK, kondisinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tingkat pendidikan, kesehatan dan agama. Hal tersebut penting untuk diperhatikan dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi yang meliputi manajemen usaha, kemitraan dan kelembagaan yang dikelola.

Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur berpenduduk 1.189.004 jiwa, yang tersebar di seluruh wilayah dengan luas 1.669,55 km². Jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 22.730 jiwa, terbagi menjadi 4.275 jiwa sebagai nelayan juragan/pemilik perahu dan 18.455 jiwa sebagai nelayan pendega/buruh yang tersebar di beberapa desa pesisir yang berada di Kecamatan Brondong dan Paciran. Jumlah armada tangkap sebanyak 5.345 buah dan 8.306 buah alat tangkap.

Kehidupan sosial ekonomi nelayan terutama nelayan pendega atau nelayan buruh, umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah dengan penghasilan yang sangat rendah pula. Akan tetapi nelayan juragan walaupun tingkat pendidikannya juga rendah, mereka memiliki penghasilan yang lebih tinggi, bahkan diantaranya termasuk golongan masyarakat menengah ke atas. Pada kenyataannya masyarakat nelayan masih hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik maupun keterbatasan dalam bidang pendidikan (Wahyono, 2001)..

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Lamongan sudah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu tahun 2001 dan tahun 2002. Tahun 2001 dengan alokasi dana pengembangan ekonomi sebesar Rp. 643.500.000,00 dilaksanakan di Desa Labuhan Kecamatan Brondong, Desa Kandang Semangkon dan Kemantren di Kecamatan Paciran, sehingga masing-masing desa mendapat alokasi dana sebesar Rp. 214.500.000,00 Sedangkan tahun 2002 alokasi dana ekonomi produktif meningkat menjadi Rp. 800.000.000,00 juga dilaksanakan di 3 desa yang lain yaitu Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong mendapat dana Rp. 267.000.000,00 Desa Tunggul dan Desa Banjarwati di Kecamatan Paciran masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp. 266.500.000,00. Dengan demikian bila dilihat dari besaran alokasi dana ekonomi produktif yang telah digulirkan di tahun 2001 dan 2002 mengalami perkembangan/peningkatan dalam jumlah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : Bagaimanakah tingkat keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2002..

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sekilas Tentang Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang hidup dan menetap di disepanjang daerah pantai kepulauan dan pulau-pulau kecil. Masyarakat pesisir memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, petani ikan, pengolah ikan, usaha jasa perikanan, usaha jasa non perikanan, usaha pemanfaatan sumberdaya laut non ikan, perhubungan laut, perdagangan antar pulau dan pariwisata bahari (Anonimus, 2002)..

Menurut Kusnadi (2001) pada dasarnya, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat dibedakan ke dalam tiga sudut pandang :

Pertama, dari sudut penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi dalam sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Secara kualitatif di desa nelayan, jumlah nelayan buruh lebih besar dibandingkan dengan nelayan pemilik.

Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya.

Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional.

2.2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata *empowerment*, yaitu sebagai suatu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat

lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moeljarto, 1996).

Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat nelayan terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people-centered development*) yang melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community-based resource management*)

Sementara itu Abipraja (2002) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung dari program-program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya untuk memandirikan masyarakat membangun kemampuan untuk memajukan diri menuju ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Menurut Sumodiningrat (1999) pemberdayaan merupakan pemberian power kepada yang tidak mempunyai power (*powerless*) sehingga dapat melaksanakan proses aktualisasi eksistensi dan mandiri. Selanjutnya dikatakan bahwa proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian keleluasaan, kekuatan/kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.

Sedangkan Tjiptoherianto dkk (1999) mengatakan bahwa pemberdayaan juga dapat menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Sementara itu Haryono dan Mubyarto (1998) menyatakan bahwa pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan atau laut secara optimal dan berkelanjutan (Anonimus, 2002)

Pendekatan yang digunakan pada program PEMP adalah (1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pelestarian pembangunan ekonomi, masyarakat dan wilayahnya. (2) Kemandirian (keswadayaan) masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan wilayahnya, (3) Kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam mengembangkan kegiatan.

Prinsip pengelolaan dan pengembangan program PEMP meliputi 9 prinsip yaitu (1) *Acceptable*. Pilihan kegiatan ekonomi (usaha) berdasarkan potensi sumberdaya, kelayakan usaha serta kebutuhan/keinginan dan kemampuan, sehingga memperoleh dukungan masyarakat. (2) *Transparancy*. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka, diinformasikan dan diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut memantaunya. (3) *Accountability*. Pengelolaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (4) *Responsiveness*. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk miskin. (5) *Quick disbursement*. Penyampaian bantuan kepada masyarakat sasaran secara cepat dan tepat. (6) *Democracy*. Proses pemilihan peserta dan kegiatan PEMP dilakukan secara musyawarah. (7) *Sustainability*. Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal dan berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. (8) *Equality*. Pemberian kesempatan kelompok lain yang belum memperoleh kesempatan, agar semua masyarakat merasakan manfaat langsung. (9) *Competitiveness*. Setiap ketentuan dalam pemanfaatan dana ekonomi produktif masyarakat diharapkan dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan jujur dalam mengajukan usulan kegiatan yang layak. (Sarman, 1997).

Jenis usaha yang didanai dalam program PEMP diprioritaskan pada jenis usaha yang dapat memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut, serta usaha-usaha lain yang terkait. Jenis usaha tersebut antara lain adalah usaha penangkapan, budidaya,

pengolahan hasil perikanan atau usaha lain yang mendukung usaha perikanan seperti perdagangan produk perikanan skala kecil.

Pengembangan usaha dalam PEMP didasarkan pada prinsip pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang lestari. Beberapa pertimbangan lainnya adalah pemanfaatan tenaga kerja lokal, penerapan prinsip kelayakan usaha (aspek legal, pasar, teknis, manajemen, finansial dan ekonomi) untuk dikembangkan.

Pengembangan modal dalam PEMP diharapkan dapat mengembangkan budaya pemupukan modal agar masyarakat nelayan mampu menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk pengembangan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

Pengembangan Program PEMP diarahkan kepada kegiatan (1) memperbesar skala usaha KMP, (2) memperluas atau membentuk KMP-KMP baru, (3) memperkuat lembaga yang sudah ada (LEPP-M3 dan KMP Desa), (4) memperluas kemitraan baik secara vertikal maupun horisontal, (5) mengembangkan kegiatan sosial pada masyarakat pesisir, (6) bekerjasama dengan instansi terkait dalam mengembangkan infrastruktur pendukung kegiatan usaha, dan (7) memperbaiki lingkungan baik lingkungan pemukiman maupun ekosistem yang ada di pesisir. (Anonimus, 2002).

Anonimus (2002) menegaskan bahwa lembaga yang harus dibentuk sebagai pelaksana program PEMP adalah Mitra Desa, Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3).

Lebih lanjut disebutkan bahwa Mitra Desa yang pembentukannya difasilitasi oleh KM Kabupaten, Camat, Dinas Perikanan dan Kepala Desa, anggotanya terdiri dari wakil pamong desa, tokoh masyarakat/adat/agama, rukun/organisasi nelayan dan wakil Dinas Perikanan. Tugas Mitra Desa memberikan masukan program PEMP, memberikan masukan penentuan kriteria calon peserta anggota KMP, mengawasi jalannya kegiatan KMP, mempertimbangkan pengembangan kegiatan KMP, mengarahkan pembentukan KMP baru, mengarahkan penggunaan dana sosial dan keagamaan.

Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) adalah kelompok masyarakat terpilih baik laki-laki atau perempuan yang memperoleh Dana Ekonomi Produktif Masyarakat untuk melaksanakan dan mengembangkan usaha ekonomi, dibentuk atas dasar

kesamaan kegiatan usaha dan atau lokasi pemukiman. Calon KMP dipilih bersama oleh KM Kabupaten dan Mitra Desa disahkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk dalam rangka pengembangan modal usaha yang dapat dikembangkan dari/menjadi Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Pembentukan LEPP-M3 difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan KM Kabupaten beserta Camat yang pengurusnya terdiri dari perwakilan KMP desa. Tugas LEPP-M3 : menerima dan menyalurkan Dana Ekonomi Produktif Masyarakat ke KMP, mencatat dan mendokumentasikan kegiatan PEMP, membukukan penggunaan dana, melaporkan perkembangan kegiatan program dan permodalan (keuangan), membantu penyelesaian KMP bermasalah, melakukan pemeriksaan pembukuan KMP, menilai dan memeriksa usulan usaha ekonomi produktif masyarakat dan pembentukan KMP baru, mengembangkan kegiatan usaha yang mendukung kegiatan usaha KMP Desa, melakukan identifikasi potensi dan pengembangan kemitraan sebagai dasar perencanaan strategis jangka pendek, menengah dan panjang, serta yang terakhir mengelola dana pengembangan modal usaha pasca kegiatan PEMP 2002 dan menyalurkannya kepada KMP baru.

Sasaran program PEMP secara umum adalah masyarakat pesisir yang menetap di daerah pantai, kepulauan dan pulau-pulau kecil. Masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, petani ikan, pedagang ikan, pengolah ikan, usaha jasa perikanan, usaha jasa non perikanan, usaha pemanfaatan sumberdaya laut non ikan, perhubungan laut, perdagangan antar pulau dan pariwisata bahari.

Secara khusus kelompok sasaran PEMP 2002 sesuai dengan urutan prioritas adalah (1) Nelayan yang menggunakan motor tempel dengan kekuatan motor maksimum 15 HP, (2) Nelayan yang menggunakan perahu layar atau dayung sebagai tenaga penggerak perahunya. (3) Nelayan pekerja / Anak Buah Kapal (ABK). (4) Pedagang ikan skala kecil, diutamakan wanita nelayan. (5) Pengolah ikan skala kecil (6) Pembudidaya ikan skala kecil dan (7) Pengelola sarana penunjang usaha perikanan skala kecil seperti bengkel reparasi mesin tempel, kios BBM, atau kios es.

2.3. Tingkat Keberhasilan Program.

Menurut Eaton (1986) ada tiga indikator untuk menilai keberhasilan program lewat kelembagan, yaitu (1) Kemampuan organisasi untuk mempertahankan hidup, yaitu sampai dimana tujuan-tujuan pembaharuannya dapat dipertahankan. (2) Sejauhmana organisasi oleh lingkungannya dianggap memiliki nilai intrinsik, yaitu dilihat lewat tingkat otonomi dan pengaruhnya. (3) Luas pengaruh, sejauhmana hubungan-hubungan yang khas dan pola-pola tindakan yang ada dalam organisasi menjadi normatif (mengikat) bagi lain-lain kesatuan masyarakat.

Keberhasilan program PEMP sangat ditentukan oleh adanya dukungan dari kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi sumberdaya lokal dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat setempat dan memperhatikan skala dan tingkat kelayakan ekonomi (Priyono, dkk, 1996). Untuk itu perlu adanya pengukuran terhadap tingkat keberhasilan program dengan ukuran : (1) tersosialisasinya program PEMP pada pihak terkait, (2) terbentuknya lembaga pelaksana dan penunjang, (3) tersalurkannya dana ekonomi produktif secara tepat jumlah, waktu dan sasaran, (4) berjalannya pembinaan kegiatan PEMP, (5) peningkatan jumlah dana, kelompok sasaran penerima. (Anonimus, 2002).

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ::

1. Mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kabupaten Lamongan.
2. Mengevaluasi tingkat keberhasilan program PEMP tahun 2002 di Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

3.2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu kajian untuk menilai pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Lamongan dan dapat menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan tahun-tahun berikutnya.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena empiris masyarakat secara luas yang didapatkan dari pernyataan dan keterangan anggota masyarakat (data yang bersifat kualitatif) dan akan dianalisis secara kualitatif juga. Seperti yang dikemukakan oleh Melly dalam Kuntjaraningrat (1997), penelitian deskriptif adalah penelitian yang melukiskan secara tepat suatu keadaan, suatu gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Penelitian ini selain memecahkan masalah, juga menuturkan, menganalisis, mengklasifikasi, membandingkan dan sebagainya.

Sedangkan metode penelitian deskriptif menurut Nawawi (1991) sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian baik yang berupa orang, masyarakat dan lain-lain. Selanjutnya dikatakan juga bahwa agar hasil penelitian mempunyai bobot yang lebih tinggi, maka fakta-fakta yang ditemukan harus diberikan penafsiran yang akurat. Dengan kata lain metode ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tertentu tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi tentang arti data itu.

4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Brondong dan Paciran Kabupaten Lamongan dipilih secara purposif dari berbagai wilayah nelayan yang ada dengan alasan karena di dua wilayah kecamatan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan ditetapkan menjadi penerima program PEMP pada tahun 2002. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2004.

4.3. Teknik Penetapan Sampel

Sampel dari penelitian (yang dalam penelitian kualitatif lebih sering disebut informan), ditetapkan secara purposif (sesuai dengan tujuan penelitian), yaitu dipilih

pihak-pihak yang mengetahui dan ikut melaksanakan program PEMP baik dari unsur masyarakat pengelola program dan masyarakat nelayan penerima program serta perangkat administrasi lokal. Informan yang dijadikan sampel merupakan orang yang sengaja dipilih karena dipandang sebagai sumber data atau informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian (Faisal, 1990)

Informan diambil dari pengelola program PEMP (yakni Mitra Desa dan LEPP-M3), penerima bantuan program (yakni Kelompok Masyarakat Pemanfaat atau KMP), perangkat administrasi lokal baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, dan Konsultan Manajemen tingkat Kabupaten.

4.4. Pengumpulan Data

Data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (depth interview) langsung pada para informan yang telah ditetapkan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara memanfaatkan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian (yakni PEMP tahun 2002), yang diambil dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu teknik observasi juga dilakukan dalam penelitian ini untuk mengamati secara langsung kehidupan, pola pemanfaatan bantuan dana dan dampaknya bagi para penerima bantuan yang ada di lokasi penelitian. (Moleong, 1994).

Adapun parameter yang digunakan sebagai pengukuran terhadap tingkat keberhasilan program dengan ukuran :

1. Tersosialisasinya program PEMP pada pihak terkait : waktu pelaksanaan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
2. Terbentuknya lembaga pelaksana dan penunjang (Mitra Desa, Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) : waktu pembentukan, jumlah dan prosesnya.
3. Tersalurkannya dana ekonomi produktif secara tepat jumlah, waktu dan sasaran.
4. Berjalannya pembinaan kegiatan PEMP.
5. Peningkatan jumlah dana, kelompok sasaran penerima.

4.5. Analisis Data

Data yang terkumpul dikelompokkan dan dikategorisasikan dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Data akan diuraikan dalam bentuk uraian-uraian kualitatif sehingga akan dianalisis secara kualitatif pula, artinya terhadap data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Proses analisis kualitatif ini menurut Miles dan Huberman (1992) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan saling susul menyusul, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Singkat Lokasi PEMP 2002

(1) Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong.

Desa Sedayulawas terletak di Kecamatan Brondong di pantai utara kabupaten Lamongan dengan luas wilayah sebesar 1.063, 783 Ha berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Desa Sendang Harjo di sebelah Selatan, Desa Brengkahi di sebelah Barat dan Desa Labuhan di sebelah Timur. Berdasar registrasi penduduk tahun 2000, jumlah penduduknya sebanyak 12.961 jiwa (3.764 KK) yang terdiri dari 6.312 jiwa laki-laki dan 6.649 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jumlah nelayan di Desa Sedayulawas 1.600 jiwa, sedang sisanya adalah petani dan bakul, pengolah dan jenis usaha yang lain.

Nelayan di Desa Sedayulawas sebagian besar masih dalam umur produktif (20 – 40 tahun) sebanyak 49 % sehingga hal ini dapat diartikan bahwa potensi sumberdaya manusia di sektor perikanan tangkap cukup besar. Hanya saja jika dilihat dari tingkat pendidikan ternyata sebagian besar (53%) penduduk kelompok sasaran hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar.

Identifikasi permasalahan yang muncul dipermukaan kehidupan masyarakat nelayan terkait erat dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga permasalahan yang muncul adalah bahwa kelompok sasaran cukup sulit untuk bisa menerima inovasi teknologi yang diterapkan. Disamping watak yang keras dan egois, kurang komunikatif sehingga sering terjadi konflik.

Potensi sumberdaya laut di Desa Sedayulawas meliputi : penangkapan rajungan (\pm 100 alat tangkap, dengan hasil rata-rata perhari/alat tangkap 1,5 Kw, harga jual rata-rata sebelum diolah Rp.40.000,00 dan setelah diolah Rp.100.000,00/kg), teri indonasi (alat tangkap 13 buah, hasil rata-rata perhari/alat tangkap 60 kg, dengan harga jual Indonasi Rp.12.000,00 dan Terinasi Rp.4000,00/kg), tongkol, tengiri dan jenis-jenis ikan lainnya (hasil rata-rata perhari/alat tangkap 35 kg, dengan harga jual Tongkol Rp.5.000,00, Manyung Rp.7.000,00/kg) . Di samping itu juga terdapat satu pengolahan/

pengupasan rajungan skala besar, pengasapan, pemindangan sekitar 20 orang dengan hasil rata-rata 50 kg perhari/pengolah dan pengolahan rumput laut. Potensi bidang budidaya terdapat tambak seluas \pm 100 Ha untuk usaha budidaya bandeng, kepiting dan udang windu.

Sarana dan prasarana penunjang usaha yang ada adalah pasar umum (bukan pasar ikan) yang dapat digunakan juga oleh para bakul untuk menjual ikan. Sarana yang lain seperti Tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga/tempat tambat perahu, pasar ikan dan bengkel mesin kapal tidak ada.

(2) Desa Tunggul, Kecamatan Paciran.

Desa Tunggul termasuk dalam wilayah Kecamatan Paciran (yang lokasinya berada di sebelah timur Kecamatan Brondong), memiliki luas wilayah \pm 350 Ha dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah Utara, Desa Blandang Agung di sebelah Selatan, Desa Paciran di sebelah Barat dan Desa Kranji di sebelah Timur. Jumlah penduduk sebanyak 3.625 jiwa (1.128 KK) dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.836 jiwa dan perempuan 1.789 jiwa. Sebagian besar penduduk (60%) berada pada posisi produktif (20 – 40 tahun), sedangkan jenjang pendidikan yang paling banyak adalah pendidikan dasar (SD) yaitu sebanyak 70 %.

Potensi sumberdaya laut meliputi penangkapan rajungan (jumlah alat tangkap 15 buah dengan hasil rata-rata 15 kg per hari/alat tangkap dan harga jual Rp.25.000,00/kg), teri indonasi (hasil rata-rata perhari/alat tangkap 20 kg dengan harga Rp.12.000,00/kg), tongkol (hasil rata-rata/hari/alat 10 kg dengan harga Rp.5.000,00/kg) dan-jenis ikan laut lainnya (kembung, layur, manyung, dorang) harga jual Rp.5.000,00/kg dan hasil rata-rata/hari/alat tangkap 30 kg. Dalam bidang pengolahan terdapat usaha pengasapan dan pemindangan dengan hasil rata-rata 50 kg/hari/pengolah, sedangkan dalam bidang budidaya terdapat tiga usaha pembenihan udang windu skala rumah tangga dengan produksi 1 – 5 juta benur per periode panen dan sebuah Hatchery besar. Sementara lahan budidaya yang lain seperti kolam, tambak maupun empang tidak dimiliki.

Sarana dan prasarana penunjang usaha untuk proses hasil tangkap lebih lanjut seperti TPI, dermaga, pasar ikan dan bengkel mesin kapal samasekali tidak tersedia di desa ini.

(3) Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran.

Desa Banjarwati juga berada dalam wilayah Kecamatan Paciran memiliki luas wilayah 326,297 Ha, sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa, sebelah Selatan Desa Drajat dan Dagon, sebelah Barat dengan Desa Kranji dan disebelah Timur berbatasan dengan Desa Kemantren. Jumlah penduduknya sebanyak 4.312 jiwa (861 KK) dengan jumlah laki-laki 2.167 jiwa dan perempuan 2.204 jiwa. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 400 jiwa.

Penduduk desa yang merupakan kelompok sasaran sebagian besar berada dalam usia produktif (20 – 40 tahun) sebanyak 64 % dan tingkat pendidikannya sebagian besar SD yaitu 71 % dan umumnya memiliki ciri khas pasif tidak kreatif.

Permasalahan yang sering muncul pada kelompok sasaran adalah sering terjadi konflik karena kurang komunikasi, watak keras dan egoisme, serta cukup sulit menerima inovasi. Manajemen dan teknologi usaha yang diterapkan masih merupakan warisan turun termurun dari nenek moyang.

Potensi sumberdaya laut di Desa Banjarwati meliputi usaha penangkapan rajungan (32 buah alat dengan hasil rata-rata perhari/alat tangkap 15 kg dan harga jual Rp.22.000,00/kg), teri indonasi (hasil rata-rata/hari/alat tangkap 20 kg dengan harga Rp.12.000,00/kg), tongkol (rata-rata perhari/alat 10 kg dengan harga Rp.5.000,00/kg), tengiri, kembung dan jenis ikan ekonomis lainnya (rata-rata hasil per hari/alat 30 kg dengan harga jual Rp.5.000,00/kg). Bidang pengolahan meliputi pengasapan, pemindangan dan pengeringan sebanyak 28 orang dengan hasil rata-rata 50 kg perhari/pengolah, sedangkan bidang budidaya seperti kolam maupun tambak nihil.

Sarana dan prasarana penunjang usaha yang ada di desa ini hanyalah sebuah bengkel mesin kapal, sementara sarana dan prasarana lain seperti TPI, dermaga, pasar ikan dan pasar umum tidak bisa ditemukan sehingga penjualan hasil penangkapan/produksi lainnya dilakukan di desa lain.

Sedangkan jenis alat tangkap yang dimiliki di tiga desa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2. Rekapitulasi Jenis Usaha/Alat Tangkap

No.	Desa	Jenis Usaha / Alat Tangkap	Jumlah	Permasalahan
1	Sedayulawas	1. Rajungan 2. Gillnet 3. Dogolan 4. Pancing 5. Bakul 6. ABK	136 115 17 13 39 112	Peralatan yaitu jaring, perahu, mesin sudah mulai usang dan tua sering terjadi kerusakan.
2	Tunggul	1. Pukat Hitam 2. Jaring 3. Purse Seine 4. Pedagang/pengolah 5. ABK	26 35 1 27 133	--idem--
3	Banjarwati	1. Jaring 2. Pukat Hitam 3. Purse Seine 4. Pengolah 5. Bakul 6. Pracangan 7. Bengkel 8. ABK	63 110 24 23 37 34 11 136	--idem--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis usaha dan atau alat tangkap yang ada di tiga desa lokasi penelitian kurang lebih sama demikian juga permasalahan yang dihadapinya. Hanya ada perbedaan sedikit di Desa Banjarwati memiliki jenis usaha yang lebih beragam dibandingkan dua desa yang lain.

5.1.2. Besaran Dana PEMP yang Diterima.

Dana ekonomi produktif yang disediakan dari APBN yang dibagi/pinjamkan kepada masyarakat untuk tahun 2002 sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan hasil keputusan rapat antara Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagro) beserta staf dengan instansi terkait di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan yang dihadiri juga Konsultan Manajemen (LPKM Universitas Airlangga) beserta Camat Brondong dan Paciran, dengan mempertimbangkan kondisi lokasi, kebutuhan dan sebagainya dana tersebut dibagi tiga kurang lebih sama besar untuk tiga desa sasaran, yaitu untuk Desa Sedayulawas sebesar Rp. 267.000.000,00 dan Desa Tunggul serta Desa Banjarwati masing-masing sebesar Rp. 266.500.000,00

5.1.3. Sosialisasi Program PEMP.

Program PEMP 2002 Kabupaten Lamongan dimulai tanggal 11 September 2002 setelah Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga memenangkan tender/penawaran pekerjaan secara terbuka dan menandatangani Surat Kesanggupan Kerja. Program berlangsung selama 90 hari kalender dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2002.

Sosialisasi Program PEMP di Kabupaten Lamongan dilakukan di tingkat dusun (RT, RW), Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Sosialisasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten didampingi staf Proyek di kantor Camat Paciran dihadiri Camat Paciran beserta staf, Kepala Cabang Dinas Perikanan, Kepala Desa Tunggul dan Banjarwati. Sedangkan untuk Kecamatan Brondong dilakukan di Balai Desa Sedayulawas dihadiri Camat Brondong beserta staf, Kepala Cabang Dinas Perikanan, dan Kepala Desa Sedayulawas. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada hari yang sama secara cepat pada hari Kamis tanggal 19 September 2002.

Sosialisasi di tingkat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pamong Desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat nelayan dilakukan di Balai Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong pada hari Rabu tanggal 25 September 2002. Kegiatan yang

dilakukan oleh Konsultan Manajemen ini dihadiri juga oleh staf kecamatan dan staf proyek, dimaksudkan untuk menjelaskan program PEMP kepada masyarakat calon penerima bantuan. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan model program, pola pengembangan usaha dan modal, pelaksanaan dan kriteria sasaran, organisasi kelembagaan dan pendanaan, serta pengembangan program.

Kegiatan yang sama juga dilakukan di Desa Banjarwati dan Tunggul Kecamatan Paciran pada hari Jumat tanggal 27 September 2002. Khusus di Desa Banjarwati hadir juga Pemimpin Proyek PEMP 2002 Kabupaten Lamongan, sedangkan di Desa Tunggul dihadiri juga oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan.

5.1.4. Pembentukan Lembaga Pelaksana dan Penunjang Program.

Pelaksanaan program PEMP di tingkat Kabupaten pada awal kegiatannya adalah Konsultan Manajemen yang mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksana dan pendukung program PEMP, yaitu Mitra Desa (MD), Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3).

Pembentukan lembaga-lembaga tersebut di Desa Sedayulawas, Banjarwati dan Tunggul sebagai lokasi pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Lamongan, secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2, 3 dan 4 berikut ini.

Tabel 2. Pembentukan Mitra Desa

No.	Desa	Waktu	Struktur Kelembagaan
1.	Sedayulawas (Kec. Brondong).	25 September 2002	Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 4 orang Anggota
2.	Banjarwati (Kec. Paciran).	27 September 2002	Ketua, Sekretaris dan 5 orang Anggota.
3.	Tunggul (Kec. Paciran).	27 September 2002	Ketua, Sektetaris dan 3 orang Anggota

Tabel 3. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP)

No.	Desa	Waktu	Nama KMP	Jenis Usaha KMP	Jumlah UnitKMP
1	Sedayulawa (Kec.Brondong)	7, 14, 17 dan 20 Oktober 2002	Pupantara Timurjaya Banjangan Pasir Putih	Rajungan Rajungan,Tongkol, Bakul Rajungan Rajungan, ABP/K, Bakul	10 $2 + 5 + 1$ $= 8$ 6 $4 + 1 + 1$ $= 6$
2.	Banjarwati (Kec. Paciran)	7, 14, 17 dan 20 Oktober 2002	Jaringan Puket Ireng Porsin Pedagang	Daya Samodera Teri Jaya Barokah Pengolah,Pracangan, Bakul dan Bengkel	3 6 3 $1 + 2 + 2$ $+ 1 = 6$
3.	Tunggul (Kec. Paciran)	7, 14, 17 dan 20 Oktober 2002	Puket Ireng Jaring Porsin Pedagang	Ikan Kakap Ikan Johor Ikan Dorang dan Ikan Teri Tongkol, Kerang dan solar	4 6 $1 + 3 = 4$ $3 + 2 + 1$ $= 6$

Kepengurusan KMP disusun seragam terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Anggota dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan berdasarkan surat Keputusan Nomor 188/770/413.105/2002 tanggal 11 Nopember 2002.

Tabel 4 Pembentukan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3)

No.	Desa	Waktu	Struktur Kelembagaan
1.	Sedayulawas (Kec. Brondong).	10, 17 dan 20 Oktober 2002	Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 3 orang Anggota
2.	Banjarwati (Kec. Paciran).	10, 17 dan 20 Oktober 2002	Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 4 orang Anggota.
3.	Tunggul (Kec. Paciran).	10, 17 dan 20 Oktober 2002	Ketua, Sektetaris, Bendahara dan 2 orang Anggota

Pengurus LEPP-M3 telah disahkan oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan berdasarkan surat Keputusan Nomor 88/769/413.105/2002 tanggal 11 Nopember 2002.

5.1.5. Penyaluran Dana Ekonomi Produktif.

Dana ekonomi produktif PEMP 2002 yang disediakan untuk diteruskan kepada masyarakat sebesar Rp.800.000.000,00. Berdasarkan hasil rapat antara Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) dan staf proyek dengan instansi terkait di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan yang dihadiri juga oleh Konsultan Manajemen beserta Camat Brondong dan Paciran, telah disepakati dibagi tiga kurang lebih sama besar kepada ketiga desa sasaran dengan rincian sebagai berikut :
Desa Sedayulawas sebesar Rp. 267.000.000,00 dan masing-masing Rp. 265.500.000,00 untuk Banjarwati dan Tunggul.

Persiapan administrasi (yang meliputi persiapan usulan KMP dan pembuatan usulan/proposal pengajuan dana ekonomi produktif) telah dilakukan Pengurus KMP dan Ketua Unit KMP, Mitra Desa, LEPP-M3 dan Kepala Desa dengan difasilitasi oleh Konsultan Manajemen. Untuk kegiatan persiapan usulan KMP telah dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan dalam tiga hari, sedangkan untuk proses pembuatan proposal dilakukan selama 10 hari pada masing-masing desa.

Proses pengajuan dana ekonomi produktif oleh ketua unit masing-masing desa (Sedayulawas, Banjarwati dan Tunggul) dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2002. kemudian oleh KMP diteruskan ke LEPP-M3 pada tanggal 20 Nopember 2002 untuk diperiksa kelengkapan persyaratan dan disetujui untuk diajukan ke Pimbagpro. Untuk ini LEPP-M3 diwajibkan membuka rekening di BNI 1946 cabang Lamongan sebagai salah satu syarat pengajuan dana yang telah dilakukan oleh LEPP-M3 Desa Tunggul dan Banjarwati pada tanggal 19 opember 2002 dan untuk Desa Sedayulawas baru dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2002. Selanjutnya Pemimpin Bagian Proyek telah mengajukan permohonan dana kepada Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara (KPKN) Bojonegoro pada tanggal 27 Nopember 2002 yang berhasil langsung dikirim dan masuk pada rekening LEPP-M3 masing-masing desa pada tanggal yang sama dalam jumlah yang sama dengan rencana/penetapan sebelumnya..

Rincian jumlah besaran dana dan sasaran dari dana ekonomi produktif yang diteruskan kepada masyarakat pemanfaat masing-masing desa lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5 Pemanfaatan Dana Ekonomi Produktif PEMP 2002 Kabupaten Lamongan

No.	Desa	No. KMP	Nama & Jumlah Unit KMP	Jumlah Anggota	Jumlah Dana
1.	Sedayulawas	1.	Timur Jaya (7)	36	Rp. 66.000.000,00
		2.	Pupantara (11)	55	Rp. 85.000.000,00
		3.	Banjangan (6)	33	Rp. 56.000.000,00
		4.	Pasir Putih (6)	30	Rp. 60.000.000,00
	Jumlah	4	30	154	Rp. 267.000.000,00
2.	Banjarwati	1.	Jaringan Daya Samudra (3)	18	Rp. 45.000.000,00
		2.	Pukat Hitam Teri Jaya (6)	36	Rp. 108.000.000,00
		3.	Porsin Barokah Jaya (3)	15	Rp. 45.000.000,00
		4.	Pedagang Mina Jaya, Hasil Laut Jaya, Mekar Jaya, Maju Jaya (6)	40	Rp. 68.500.000,00
	Jumlah	4	18	106	Rp. 266.500.000,00
3.	Tunggul	1.	Puket Ireng Ikan Kakap (4)	17	Rp. 59.500.000,00
		2.	Jareng Ikan Johor (6)	27	Rp. 67.500.000,00
		3.	Pedagang Tongkol, Kerang, Unggul Jaya (6)	24	Rp. 46.500.000,00
		4.	Porsine Ikan Dorang, Ikan Teri (4)	24	Rp. 93.000.000,00
	Jumlah	4	20	92	Rp. 266.500.000,00
	Jumlah Keseluruhan	12	68	352	Rp. 800.000.000,00

5.1.6. Pembinaan Kegiatan PEMP.

Pembinaan kegiatan PEMP dilakukan selama dan sesudah program berjalan, pada saat program berjalan dilakukan pembinaan oleh Konsultan Manajemen maupun oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. Sedangkan setelah/pasca paogram karena tugas Konsultan Manajemen telah selesai maka pembinaan terhadap kegiatan PEMP selanjutnya dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan.

Pembinaan selama proyek dilakukan oleh Konsultan Manajemen dengan mendatangi secara langsung ke LEPP-M3 maupun KMP rata-rata dua kali seminggu, sedangkan pihak Dinas Perikanan melakukan kunjungan tiga minggu sekali. Disamping itu laporan perkembangan/kemajuan program dilakukan dalam bentuk laporan bulanan maupun tribulan, yang berlangsung terus sampai dengan kegiatan pasca program yang kemudian sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. Mekanisme pertemuan silaturahmi antar LEPP-M3 program PEMP 2001 dan 2002 juga telah diciptakan oleh pihak Dinas untuk menjadi bentuk pembinaan yang lain. Forum komunikasi ini menyelenggarakan pertemuan periodik 6 bulan sekali dengan berpindah-pindah tempat (meliputi 6 wilayah LEPP-M3).

5.1.7. Peningkatan Jumlah Dana dan Kelompok Sasaran Penerima.

Program PEMP 2002 Kabupaten Lamongan telah berjalan sekitar dua tahun tentunya dalam kurun waktu itu telah terjadi perubahan dan atau perkembangan baik mengenai jumlah dana yang digulirkan maupun jumlah kelompok masyarakat yang dapat manfaat karena adanya program. Perubahan atau perkembangan ini lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 6, 7 dan 8.

Tabel 6. Perkembangan Jumlah Dana dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) Desa Sedayulawas

No.	Bulan	Moda/Dana	Anggota
1.	Desember 2002	Rp. 267.000.000,00	154
2.	Januari 2003	Rp. 267.753.000,00	164
3.	Pebruari 2003	Rp. 268.209.000,00	174
4.	Maret 2003	Rp. 268.962.000,00	180
5.	April 2003	Rp. 269.504.000,00	189
6.	Mei 2003	Rp. 270.205.000,00	197
7.	Juni 2003	Rp.270.998.000,00	202
8.	Juli 2003	Rp. 271.693.700,00	206
9.	Agustus 2003	Rp. 271.693.700,00	206
10.	September 03	Rp. 272.041.550,00	208
11.	Oktober 2003	Rp. 272.155.850,00	208
12.	Nopember 03	Rp. 272.155.850,00	208
13.	Desember 2003	Rp. 272.618.000,00	212
14.	Januari 2004	Rp. 272.618.000,00	212
15.	Pebruari 2004	Rp. 272.868.000,00	215
16.	Maret 2004	Rp. 272.868.000,00	215
17.	April 2004	Rp. 273.098.400,00	215
18.	Mei 2004	Rp. 273.212.400,00	216
19.	Juni 2004	Rp. 273.212.400,00	216
20.	Juli 2004	Rp. 273.455.700,00	218
21.	Agustus 2004	Rp. 273.455.700,00	218

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Dana dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) Desa Banjarwati

No.	Bulan	Modal/Dana	Anggota
1.	Desember 2002	Rp. 266.500.000,00	106
2.	Januari 2003	Rp. 267.100.000,00	108
3.	Pebruari 2003	Rp.271.475.250,00	116
4.	Maret 2003	Rp.272.557.375,00	123
5.	April 2003	Rp.273.669.450,00	129
6.	Mei 2003	Rp.274.996.235,00	132
7.	Juni 2003	Rp.275.476.395,00	134
8.	Juli 2003	Rp. 276.755.415,00	138
9.	Agustus 2003	Rp. 276.856.875,00	138
10.	September 03	Rp. 277.056.145,00	142
11.	Oktober 2003	Rp. 277.153.275,00	142
12.	Nopember 03	Rp. 278.993.275,00	145
13.	Desember 2003	Rp. 279.671.000,00	146
14.	Januari 2004	Rp. 279.959.606,00	147
15.	Pebruari 2004	Rp. 280.185.162,00	147
16.	Maret 2004	Rp. 280.414.257,00	148
17.	April 2004	Rp. 280.619.922,00	148
18.	Mei 2004	Rp. 280.770.727,00	148
19.	Juni 2004	Rp.281.425.225,00.	150
20.	Juli 2004	Rp. 281.425.225,00	150
21.	Agustus 2004	Rp. 282.141.475,00	152

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Dana dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) Desa Tunggul.

No.	Bulan	Modal/Dana	Anggota
1.	Desember 2002	Rp. 266.500.000,00	92
2.	Januari 2003	Rp. 267.150.610,00	102
3.	Pebruari 2003	Rp. 267.736.270,00	111
4.	Maret 2003	Rp. 268.251.640,00	121
5.	April 2003	Rp. 268.965.925,00	133
6.	Mei 2003	Rp. 269.653.990,00	144
7.	Juni 2003	Rp.270.225.915,00.	153
8.	Juli 2003	Rp. 270.847.795,00	158
9.	Agustus 2003	Rp. 271.432.570,00	170
10.	September 03	Rp. 272.064.470,00	181
11.	Oktober 2003	Rp. 272.635.170,00	189
12.	Nopember 03	Rp. 273.089.820,00	197
13.	Desember 2003	Rp. 273.759.150,00	204
14.	Januari 2004	Rp. 274.387.950,00	214
15.	Pebruari 2004	Rp. 274.788.750,00	221
16.	Maret 2004	Rp. 275.529.150,00	229
17.	April 2004	Rp. 276.107.550,00	236
18.	Mei 2004	Rp. 276.858.750,00	244
19.	Juni 2004	Rp. 277.558.950,00	251
20.	Juli 2004	Rp. 278.560.050,00	261
21.	Agustus 2004	Rp. 279.307.950,00	269

5.2. Pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PEMP 2002 Kabupaten Lamongan yang mulai dilaksanakan pada tanggal 11 September 2002 telah dilaksanakan oleh pihak Konsultan Manajemen Kabupaten (dalam hal ini Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga).

Hasil diskripsi dari ke tiga wilayah desa lokasi program PEMP tahun 2002 menunjukkan bahwa ditinjau dari segi umur penduduk termasuk dalam usia produktif, akan tetapi apabila dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Usaha yang ditekuni sebagian besar adalah menangkap ikan di Laut dengan peralatan yang dimiliki pada umumnya masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas. Keadaan ini mengakibatkan bahwa pada umumnya nelayan di tiga lokasi mempunyai penghasilan yang sangat rendah, mengingat jumlah dan harga hasil tangkapan dari melaut masih rendah (jauh lebih rendah dari harga pasaran).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya masyarakat dari ketiga desa tersebut termasuk dalam katagori kelompok sasaran dari Program PEMP, dengan harapan dapat meningkatkan penghasilan dan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap, khususnya di Kabupaten Lamongan. Akan tetapi jika dilihat dari besarnya dana PEMP tahun 2002, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada ke tiga desa tersebut, maka relatif masih kurang terpenuhi.

5.2.1. Sosialisasi Program PEMP.

Sosialisasi program PEMP 2002 telah dilakukan secara bertingkat dari Kabupaten sampai dengan tingkat Desa, yang selalu dilakukan bersama-sama oleh Konsultan Manajemen dan pihak Bagian Proyek. Hal ini menunjukkan bukti tanggungjawab dari kedua belah pihak yang memang punya tanggungjawab dan kewajiban untuk menggulirkan dana dan mensukseskan program PEMP 2002 Kabupaten Lamongan. Sosialisasi dilakukan secara bertingkat selain agar pejabat dan pihak-pihak yang terkait program mengetahui dan memahaminya juga agar lapisan masyarakat yang

kemungkinan memerlukan bantuan dana dapat lebih luas/banyak. Hal ini menunjukkan bahwa program PEMP 2002 Kabupaten Lamongan telah tersosialisasi dengan baik (Anonimus. 2002), bahwa salah satu keberhasilan program adalah tersosialisasikannya program kepada berbagai lapisan masyarakat.

5.2.2. Pembentukan Lembaga Pelaksana dan Penunjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua lembaga pelaksana dan lembaga penunjang PEMP (Mitra Desa, Kelompok Masyarakat Pemanfaat/KMP dan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina/LEPP-M3) telah terbentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dokumen laporan bulanan Konsultan Manajemen kepada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan dan didukung wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa proses pemilihan pengurus masing-masing lembaga telah dilakukan secara demokratis dan langsung oleh berbagai lapisan masyarakat pesisir. Pembentukan lembaga dan pemilihan pengurus ini juga dihadiri oleh pihak Kecamatan, Dinas/proyek dan Konsultan. Hasil kegiatan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu oleh Kepala Desa bagi Mitra Desa serta Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan untuk KMP dan LEPP-M3.

Susunan pengurus di ketiga lembaga tersebut telah sesuai dengan ketentuan, yaitu untuk Mitra Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, KMP terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara sedangkan untuk LEPP-M3 Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota..

Sebagai lembaga penunjang, Mitra Desa berfungsi membantu dalam menetapkan dan mengembangkan KMP, memfasilitasi bila ada permasalahan yang muncul dan mengawasi jalannya program PEMP di desa. KMP sebagai kelompok masyarakat yang menerima dan memanfaatkan dana, telah dibentuk berdasarkan kesamaan lokasi atau tempat tinggal (untuk Desa Sedayulawas) sedangkan di desa yang lain yaitu Tunggal dan Banjarwati pembentukan kelompok lebih didasarkan kepada kesamaan alat usaha dan atau jenis usaha. (Eaton, 1986). LEPP-M3 sebagai pelaksana

program, merupakan kunci utama keberhasilan program dan diharapkan perkembangannya kearah lembaga yang berbadan hukum seperti koperasi, Perseroan Terbatas dan atau yang sejenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LEPP-M3 di tiga desa dimaksud belum mampu merubah statusnya kearah tersebut.

5.2.3. Penyaluran Dana Ekonomi Produktif.

Proses penyaluran dana telah dilakukan secara berurutan dan simultan oleh KMP, LEPP-M3 dan Pimbagpro (Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan) dengan difasilitasi oleh Konsultan Manajemen. Jika dilihat dari jumlah dana ekonomi produktif sebesar Rp.800.000.000,00 ternyata telah diterima secara penuh dan lengkap oleh LEPP-M3 masing-masing desa sesuai dengan penetapan besarnya.

Jika dilihat dari sisi waktu, pencairan dana yang telah dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2002 berlangsung masih dalam masa proyek berjalan. Namun jika dilihat dari waktu pembagian/penerimaan dana kepada KMP yang baru berlangsung pada tanggal 24 dan 25 Desember 2002, berarti telah mengalami keterlambatan karena telah melewati masa proyek yaitu tanggal 10 Desember 2002. Berdasarkan informasi dari berbagai informan penelitian ini baik Pimbagpro, KM Kabupaten, LEPP-M3, Mitra Desa dan KMP ternyata telah ditetapkan kesepakatan bahwa pembagian dana melebihi tanggal akhir proyek, karena pada tanggal-tanggal tersebut bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri 1423 H. Sehingga diharapkan dana yang dibagi terlambat tersebut benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan produktif bukan untuk keperluan konsumtif.

Jika dilihat dari sisi sasaran masyarakat penerima, dapat diketahui bahwa seluruh kelompok masyarakat (KMP) beserta unit-unit yang telah ditetapkan telah dapat menerima bantuan dana sesuai dengan usulan/proposal pengajuan dana masing-masing, baik yang bersifat perorangan/individual maupun kelompok. (Abipraja, 2002).

5.2.4. Pembinaan Kegiatan Program.

Kegiatan pembinaan menjadi bagian yang tidak terlepas dalam pelaksanaan suatu program (Anonimus, 2002), oleh karena itu dalam program PEMP ini ternyata pembinaan selama program dan pasca program telah dilakukan sebagaimana mestinya.

Pembinaan selama proyek dilakukan oleh Konsultan Manajemen dan Pimbagpro sedangkan pasca proyek dilakukan oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk konsultasi langsung, laporan berkala dan forum komunikasi.

5.2.5. Peningkatan Jumlah Dana dan Kelompok Sasaran.

Jika dilihat data perkembangan jumlah dana maupun kelompok penerima, hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan selama 20 bulan pelaksanaan program (Desember 2002 sampai dengan Agustus 2004).

Secara garis besar untuk Desa Sedayulawas terlihat dana awal pada tahun 2002 sebesar Rp.267.000.000,00 dengan jumlah anggota penerima 154, pada tahun 2003 berkembang menjadi Rp.272.155.850,00 dengan penerima sebesar 208, kemudian pada tahun 2004 bertambah menjadi Rp.273.455.700,00 dengan anggota 218. Dengan demikian selama 2 tahun telah terjadi penambahan dana sebesar Rp. 6.455.700,00 dan anggota bertambah 64 orang.

Desa Banjarwati pada awal pelaksanaan program tahun 2002 dana produktif yang digulirkan sebesar Rp.266.500.000,00 dengan jumlah anggota penerima sebesar 106, pada tahun 2003 telah meningkat menjadi Rp.278.993.275,00 dengan jumlah anggota 145 dan kemudian pada tahun 2004 bertambah menjadi 152 anggota dengan dana sebesar Rp. 282.141.475,00. Dengan demikian telah terjadi peningkatan sebesar 46 anggota dan dana sebesar Rp. 15.641.475,00.

Sementara di Desa Tunggul juga terlihat kondisi yang kurang lebih sama, yaitu dana awal pada tahun 2002 sebesar Rp.266.500.000,00 jumlah anggota 92 telah berkembang menjadi 197 dengan dana Rp.273.089.829,00 pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 bertambah lagi menjadi Rp.279.307.950,00 dengan anggota menjadi 269 orang. Dengan demikian telah terjadi penambahan dana sebesar Rp.12.807.950,00 sedangkan anggota bertambah sebesar 177 orang.

Peningkatan dana di tiga desa penerima terlihat pola yang berbeda, yaitu di Sedayulawas terjadi peningkatan yang tidak terlalu besar demikian pula dalam hal anggota KMP. Sedangkan Banjarwati telah terjadi penambahan dana yang besar tetapi

penambahan jumlah anggota KMP tidak banyak. Sementara di Tunggul telah terjadi peningkatan yang relatif besar baik di dana maupun jumlah anggota.

Perbedaan ini terjadi karena di Sedayulawas angsuran dari KMP tiap-tiap bulan sangat lambat dan seringkali tidak mengangsur bila dibandingkan dengan dua desa lain. Sedangkan di Banjarwati peningkatan yang tidak seimbang antara dana dengan anggota KMP karena pengguliran dana berikutnya diutamakan kepada calon anggota yang memiliki kemampuan relatif tinggi baik dilihat dari jenis usaha maupun penghasilannya, selain juga kadang-kadang ada ketersendatan dalam mengangsur.

Berarti dalam hal ini dana yang diberikan relatif besar dan penerimanya relatif sedikit. Di Tunggul terjadi peningkatan tinggi yang seimbang antara dana dan jumlah anggota, karena angsuran sebagian besar anggota berjalan relatif lancar sehingga pengguliran dana bagi anggota baru juga berjalan lancar tersebar relatif merata pada kelompok-kelompok yang ada.

Ketidaklancaran anggota KMP dalam mengangsur terutama yang terjadi di Sedayulawas maupun kadang-kadang di Banjarwati, karena terjadinya musim paceklik pada musim barat sehingga tidak bisa melaut, kerusakan alat karena alam dan olah manusia, tidak disiplinnya anggota dalam mengangsur, rendahnya tingkat kesadaran untuk mengangsur dan ketidak disiplinan ketua kelompok dalam menangani angsuran yaitu enggan untuk menagih.

Dengan demikian pelaksanaan PEMP 2002 di Kabupaten Lamongan terjadi perubahan jumlah dana dari Rp.800.000.000,00 menjadi Rp.834.905.125,00 berarti telah terjadi peningkatan dana sebesar Rp. 34.905.125,00 atau 4,36 %, jumlah anggota KMP telah berubah dari 352 menjadi 639 berarti terjadi penambahan sebanyak 287 orang atau 81,53 %..

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka simpulan yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum program PEMP 2002 Kabupaten Lamongan dapat dikatakan kurang berhasil ditinjau dari tersosialisasinya program, terbentuknya lembaga-lembaga, tersalurkannya dana ekonomi produktif, berjalannya pembinaan dan peningkatan jumlah dana dan kelompok sasaran.
2. Pengembangan lembaga yang sudah dibentuk belum dapat berjalan optimal karena selama dua tahun belum mengarah pada perubahan menjadi lembaga yang berbadan hukum.
3. Peningkatan jumlah dana kurang berhasil karena selama dua tahun berjalan hanya terjadi peningkatan sebesar 4,36 %. Sedangkan untuk penambahan jumlah anggota KMP dapat disebut berhasil karena terjadi peningkatan sebesar 81,53 %.
4. Terdapat pola peningkatan dana dan jumlah anggota yang berbeda diantara tiga desa, yaitu Desa Sedayulawas penambahan dana dan anggota relatif rendah, Desa Banjarwati penambahan dana relatif tinggi tetapi anggota relatif rendah, sedangkan di Desa Tunggul baik dana maupun jumlah anggota meningkat relatif tinggi.

6.2. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan PEMP maka perlu peningkatan kesadaran, kedisiplinan, pengawasan, pembinaan yang melibatkan semua pihak yang terkait, melalui penerapan peraturan yang lebih tegas
2. Untuk menurunkan jumlah anggota KMP yang tidak merangsur yang jumlahnya cukup besar, diperlukan adanya ketentuan agunan yang harus dipenuhi secara benar oleh calon anggota KMP..

DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, S, 2002, *Perencanaan Pembangunan di Indonesia : Konsep, Model, Kebijakan, Instrumen dan Strategi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Anonimus, 2002, *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)*, Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta..
- Eaton, W.J. (ed), 1986, *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional : dari Konsep ke Aplikasi*, UI Press, Jakarta.
- Faisal, S, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Haryono dan Mubyarto, 1998, *Mendampingi Perkembangan Ekonomi Rakyat, Laporan Kaji Tindak Propinsi Sulawesi Selatan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Kusnadi, 2001, "Redefinisi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Laut di Perairan Selat Madura", dalam *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, FISIP UNAIR, No. 2 Tahun XIII, April, Surabaya.
- Miles, M. B, dan Michael A Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Molcong, L.J, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nawawi, H, 1991, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Priyono, O, dan Moeljarto P, 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Sarman M, 1997, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Prisma No,1 Tahun 1997, Jakarta.
- Sumodiningrat, G, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Gramedia Jakarta.
- Tjiptoherijanto, P dan Soemitro, 1999, *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas SDM*, : PT. Citra Bangsa, Jakarta.
- Wahyono, A (et. al), 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Lampiran I.

Produksi Ikan Propinsi Jawa Timur per Kabupaten/Kota Tahun 2000

No	Kab/Kota	Perikanan anLaut	Perairan Umum	Tambak	Sawah Tambak	Kolam	Mina Padi	Karam- ba	Jumlah
01	Pacitan	2.357	124	-	43	61	-	-	2.585
02	Ponorogo	-	81	-	-	327	-	1	409
03	Tringgalek	7.702	10	-	-	253	-	-	7.964
04	Tingagung	1.170	241	37	-	4.120	-	-	5.568
05	Blitar	48	1.016	294	-	1.299	188	7	2.851
06	Kediri	-	1.301	-	-	567	278	-	2.146
07	Malang	828	749	134	-	49	13	9	1.782
08	Lumajang	-	584	311	-	312	105	662	1.974
09	Jember	9.385	269	367	-	1.072	39	5	11.137
10	Banyuwangi	1.833	158	531	-	105	8	4	2.689
11	Bondowoso	-	552	-	-	99	57	21	729
12	Situbondo	10.484	27	3.256	-	10	-	11	13.788
13	Prabolinggo	8.439	162	3.114	-	112	-	5	11.831
14	Pasuruan	10.073	196	4.254	-	79	13	543	15.156
15	Sidoarjo	11.017	276	20.011	-	106	-	-	31.409
16	Mojokerto	-	124	-	-	81	14	-	219
17	Jombang	-	451	-	6	757	15	5	1.235
18	Nganjuk	-	1.235	-	-	1.284	355	-	2.874
19	Madiun	-	133	-	-	133	-	-	266
20	Magetan	-	114	-	-	92	-	-	206
21	Ngawi	-	1.216	-	-	360	29	110	1.715
22	Bloongoro	-	2.535	-	172	317	15	-	3.038
23	Tuban	10.982	1.513	968	2.030	420	-	-	15.913
24	Lamongan	36.576	1.947	1.237	27.250	833	246	-	68.088
25	Gresik	19.881	556	21.902	9.149	31	-	-	51.518
26	Bangkalan	20.106	94	1.348	20	4	-	-	21.572
27	Sampang	24.004	-	2.528	-	39	-	-	26.571
28	Pamekasan	19.888	69	316	-	44	-	-	20.316
29	Sumenep	41.463	56	896	-	41	-	-	42.456
30	Muncar	46.277	-	447	-	29	-	-	46.753
	Jumlah	219.177	15.789	62.001	38.670	13.037	1.376	1.382	368.005

Jumlah produksi ikan dalam Ton.

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2000.